BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wirangunangun, beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1961. Secara pasti tidak diketahui berapa lama Kota Bandung dibangun, akan tetapi kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendeles, melaiknkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (*the founding father)* Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Awalnya, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeh Kolot) kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusuma II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum 1”, kekuasaan di Nusantara beralih dari komponen ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jendral pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur kira-kira 1000 km) untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa. Pembangunan Jalan Raya Pos itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan Bupati daerah masing-masing.

Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Raya Sudirman – Jalan Raya Asia Aprika – Jalan Raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan Jalan Raya Pos dan supaya pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor Bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota Kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawak (Tanjung Sari), mendekati Jalan Raya Pos.

Daendels ternyata tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahlan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang) alasan pemindahan ibukota itu anatara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Tahun 1808/awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan yang akan dijdika ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal

di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian selanjutnya ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang).

Tanggal 21 Februari 1906, pada masa pemerintahan R.A.A Martanegara (1893-1918). Kota Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Gemente (*Kota Pradja*), dengan pejabat Walikota pertama adalah tuan B. Coops. Sejak saat itulah Kota Bandung resmi terlepas dari pemerintaan Kabupaten Bandung sampai sekarang.

3.2 Gambaran Umum BPPT Kota Bandung

3.2.1 Visi BPPT Kota Bandung

Sehubungan Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang baru telah bergabung (*merger*) dengan Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu pada 20 tahun mendatang, serta pengalihan aspirasi dan persepsi masyarakat yang masuk ke pemerintah Kota Bandung, maka Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah sebagai berikut“ terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten menuju kota jasa yang bermartabat”.

Kata pelayanan satu pintu (*one stop service)* maksudnya adalah kegiatan penyelenggara perijinan dan non-perijinan, yang proses pengelolaannya mulai dari

tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur. Dengan konsep ini, dalam mengurus perijinan,pemohon cukup hanya dating ke satu tempat dan hanya bertemu dengan petugas *(Front Office)* sehingga dapat meminimalisir interaksi antar pemohon dengan petugas perijinan da menghindari pungutan-pungutan tidak resmi.

Konsep pelayanan terpadu merupakan salah satu pengembangan bentuk pelayanan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 sebagai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan pelayanan.

Adapun kata "Bermartabat" tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda No 6 tahun 2004, yaitu "Kota Jasa yang BERMARTABAT", sangat relevan dengan untuk dijadikan visi BPPT Kota Bandung, yang menunjukan eksistensi masyarakat kota yang dijadikan teladan karena kebersihan, keamanan, kemakmuran, ketaatan, keadilan dan ketaqwaan adalah modal dasar dalam menarik investasi ke Kota Bandung.

Kota Bandung menjadi tujuan investasi yang bermartabat adalah Kota yang menjadi tujuan utama para investor menanamkan modalnya di Kota Bandung yang memiliki harga diri, kehormataan, keadilan, dan harkat kemanusiaan.

3.2.2 Misi BPPT Kota Bandung

Untuk mencapai visi diatas, maka misi yang di usulkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional
2. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi
3. Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis *e-Government*
4. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya lokal, responsivitas, resnponsibilitas, akuntabilitas, tranparansi, dan kepastian hukum
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal

3.2.3 Tugas BPPT Kota Bandung

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu perijinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok maka BPPT Kota Bandung memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu yang meliputi modal, perijinan usaha, pelayanan perijinan usaha, pelayanan perijinan non-usaha serta data dan sistem informasi.
3. Pelaksanaan teknis ketatausahaan badan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.4 Jumlah Pegawai BPPT Kota Bandung

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung mempunyai jumlah aparatur sebanyak 168 orang. Adapun susunan berdasarkan tingkat golongan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah BPPT Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Ivb	2
2.	Ivb	3
3.	IIId	15
4.	IIIc	15
5.	IIIb	12
6.	IIIa	31
7.	Iid	15
8.	Iic	10
9.	Iib	1

10.	Iia	18
11.	IC	1
JUMLAH PNS		**123**
12	TKK	34
13	Magang	11
JUMLAH TOTAL		**168**

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian BPPT Kota Bandung Tahun 2010

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat sebagian besar aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung mayoritas merupakan pegawai dengan golongan III yaitu 73 orang, diikuti aparatur dengan golongan II yaitu 44 orang. Sedangkan aparatur yang masih statusnya sebagai tenaga kerja kontrak (TKK) dan Magang berjumlah 45 orang, serta aparatur dengan golongan IV berjumlah 5 orang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa data tersebut memang telah menunjukan kesesuaian komposisi aparatur menurut tingkat golongan, yang diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan implementasai kebijakan SIM-PTSP dalam meningkatkan pelayanan perijinan mendirikan bangunan di BPPT Kota Bandung.

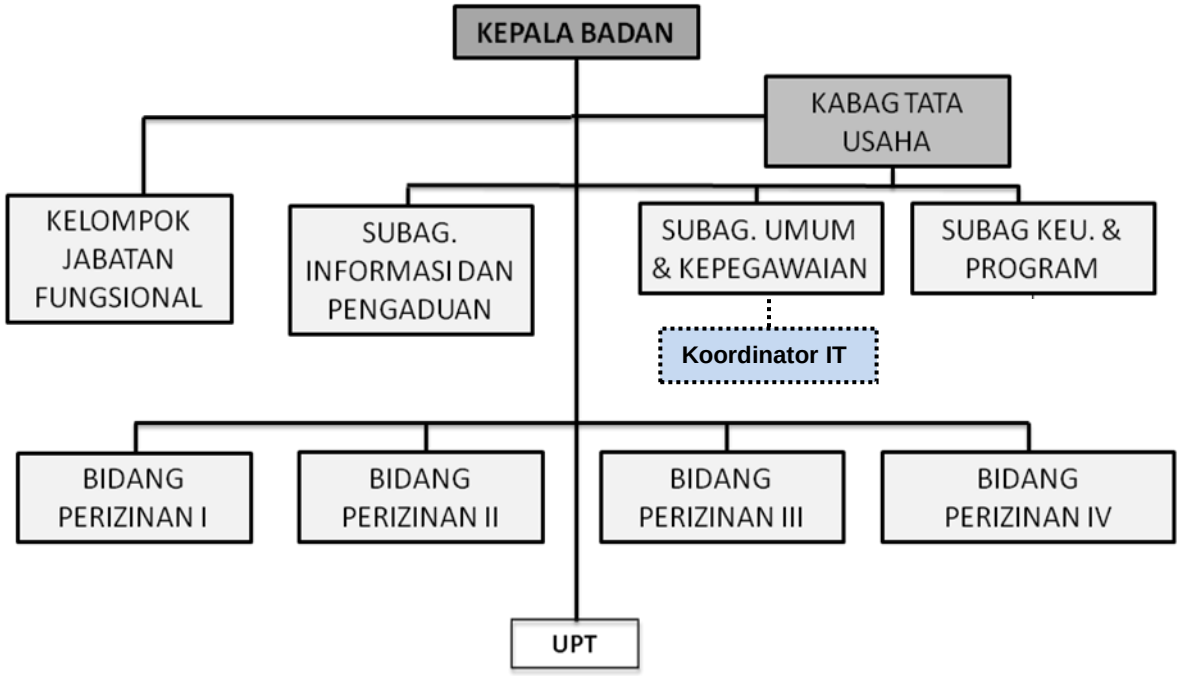
3.2.5 Susunan Organisasi BPPT Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang siginifikan terhadap

cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi, ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya, struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pendepartemenan atau pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Pada awal tahun 2010 Terdapat perdampingan organisasi, yang didasari oleh Peraturan Mendagri No. 20, untuk mengurangi pejabat eselon IV demi efisiensi. Sehingga menghapus jabatan Kepala Sub-Bidang, termasuk Sub-Bidang Pengembangan Sistem IT. Posisi Bidang Data dan Informasi dihapuskan, sehingga tidak ada jabatan struktural untuk menangani IT, dan hanya terdapat koordinator IT (non jabatan) dibawah Subag Umum dan Kepegawaian dan hanya mempunyai kewenangan pemeliharaan TI, dan penyusunan dan penggunaan anggaran untuk TI.

Tabel 3.2
Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung



Sumber : BPPT Kota Bandung Januari 2010

Dalam struktur BPPPT Kota Bandung seperti terlihat pd gambar 3.2 di atas, dimana organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kemudian membawahi kelompok jabatan fungsional dan Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi tiga Sub-bagian yaitu, Subag Informasi dan Pengaduan, Subag Umum dan Kepegawain, Subag Keuangan dan Program. Ketiga Kubag tersebut posisinya sejajar dengan kelompok jabatan fungsional yang sama-sama bertanggung jawab kepada Kabag Tata Usaha. Subag Umum dan Kepagawaina secara langsung membawahi defisi IT yang dikepalai seorang Koordinator IT yang mana dalam penelitian ini merupakan objek penelitian.

Kemudian terdapat empat Bidang Perizinan yang terdiri dari Bidang Perizinan I, II, III, IV yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam proses pembuatan perizinan sebanyak 30 jeniz perizinan, keempat Bidang Perizinan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Badan

3.2.6 Perizinan yang ada di BPPT Kota Bandung

1. Izin Lokasi
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Usaha dan perumahan > 100m2)
4. Izin Gangguan
5. Izin Tempat Usaha
6. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)
7. Izin Reklame
8. Izin Pemancangan tiang pancang JPO/Rek
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Tanda Daftar Industri (TDI)
13. Tanda Daftar Gudang
14. Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung
15. Izin Trayek

16. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan
17. Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan yang sejenisnya
18. Izin Wartel/Warnet
19. Izin (Baru): HP Kios, Wartel/Kios Phone
20. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
21. Izin Pengelolaan tempat Parkir
22. Izin Penyelenggaraan Kursus Umum
23. Izin Jasa Titipan
24. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran
25. Izin Pematangan Lahan/Tanah
26. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
27. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
28. Izin Eksploitasi Air Bawah tanah
29. Izin Penggalian Daerah Milik Jalan (DAMIJA)
30. Izin Pengambilan Air Permukaan

3.3 Gambaran Umum Sistem Informasi Boss di BPPT Kota Bandung

3.3.1 Tampilan Program Boss yang ada di BPPT Kota Bandung

Teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi mencari layanan yang fleksibel, serba mudah, memuaskan dan efisien, teknologi

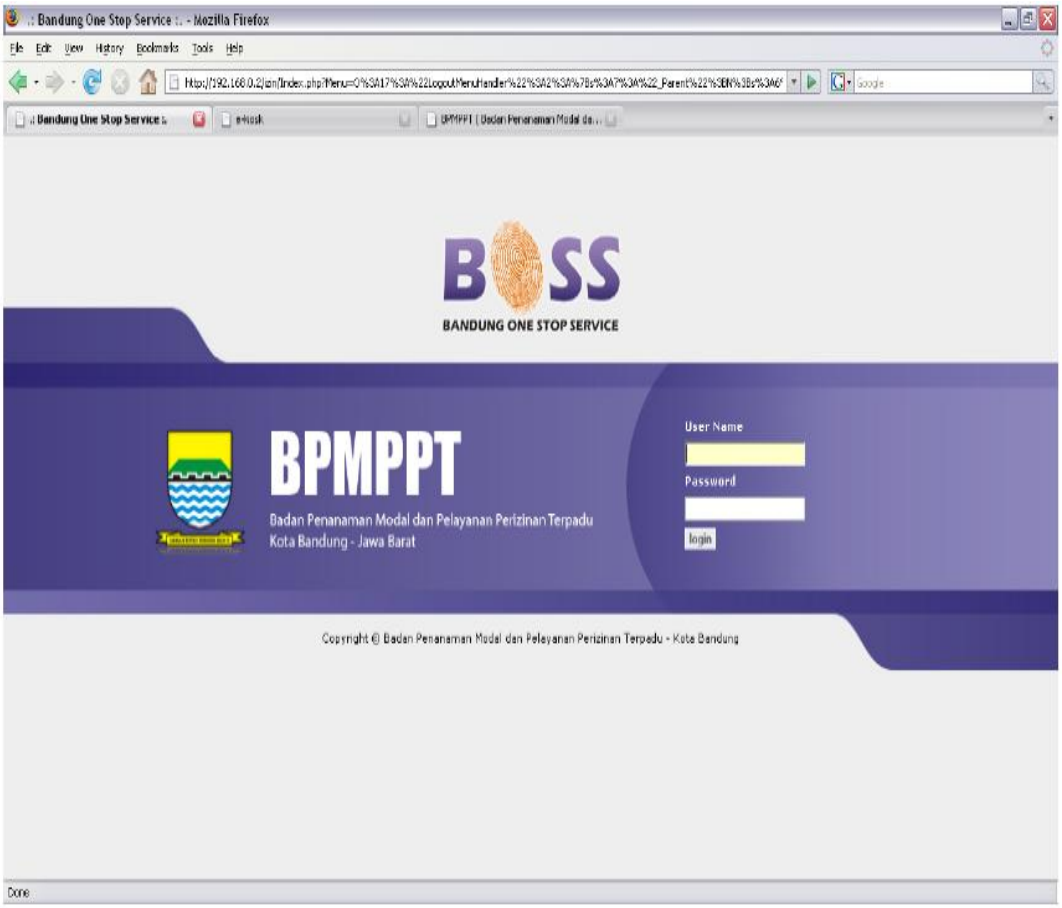
telematika khususnya teknologi informasi sudah menjadi tuntutan bagi dunia global. Untuk memfasilitasi tuntutan masyarakat modern, khususnya para masyarakat atau para calon investor yang ingin mengetahui tentang informasi perizinan, dapat datang langsung ke BPPT Kota Bandung dengan melihat tampilan berupa Mapinfo melalui Sistem informasi Boss, atau tanpa datang ke BPPT langsung pun masyarakat atau para calon investor yang akan membuat perizinan atau cuman pengen tau tentang perizinan apa saja yang ada di Kota Bandung, masyarakat atau para calon investor bisa langsung membuka web publik BPPT Kota Bandung yaitu *bpptbandung.or.id* atau *bppt.com*.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dalam memberikan informasi perizinan kepada masyarakat atau calon investor melalui sistem informasi Boss, maka aparatur akan memberikan arahan mengenai mekanisme sistem tersebut. Dengan demikian apabila masyarakat atau para calon investor ingin mendapatkan informasi tentang perizinan dengan jelas, maka dapat langsung datang ke bagian penyusunan program selanjutnya nanti akan diberikan penjelasan oleh aparatur tentang sistem informasi Boss di Kabupaten Bandung.

Aplikasi ini menyediakan informasi, pendaftaran, pengaduan dan status pemprosesan yang berkaitan dengan perizinan. Dengan demikian, pengguna dari aplikasi ini adalah masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang aplikasi penanaman modal, an dasar hokum pelayanan perizinan, prosedur dan persyaratan serta biaya perizinan.

Selanjutnya, melalui aplikasi ini juga masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui pengisian formulir-formulir serta elektronik dan dapat memonitor status penyelesaian pemprosesannya serta dapat juga mengajukan pengaduan. Sistem disediakan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pelayanan perizianan yang diberikan oleh BPPT. Dengan demikian diharapkan dapat mendekatkan jarak antara masyarakaat, investor dan BPPT.

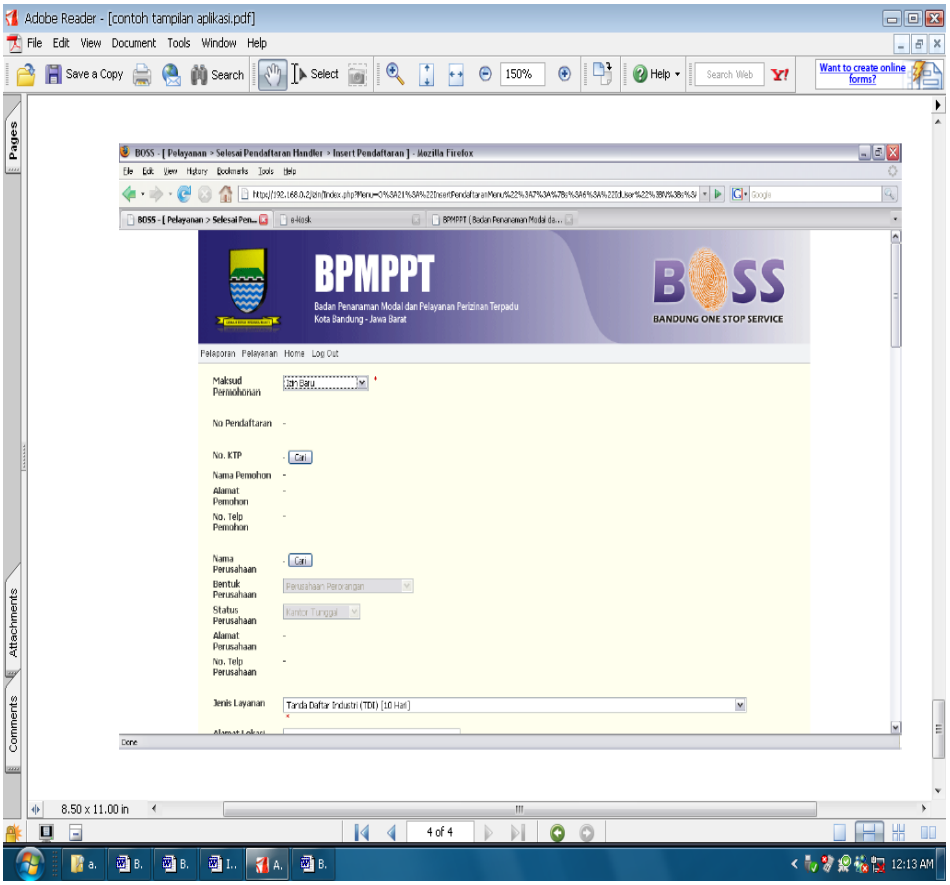
Gambar 3.1
Tampilan Hal. Utama Sistem BOSS



Sumber : BPPT Kota Bandung Tahun 2010

Gambar 3.1 merupakan tampilan Web publik BPPT Kota Bandung, disediakan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pelayanan perizinan yang diberikan oleh BPPT. Dengan demikian diharapkan dapat mendekatkan jarak antara masyarakat, investor dan BPPT. Portal BPPT ini juga memberikan informasi mengenai peluang investasi.

Gambar 3.2
Tampilan Hal. Formulir Pembuatan Perijinan



Sumber : BPPT Kota Bandung Tahun 2010

Gambar 3.2 di atas merupakan tampilan formulir pengajuan pembuatan perijinan yang ada dalam sistem Boss, disana para calon pembuat ijin dalam hal ini

perorangan atau kelompok serta badan usaha dapat mengisi biodata dan jenis perijinan yang mereka inginkan.

3.3.2 Cara Meng-Akses Web Publik BPPT Kota Bandung

a. Gunakan browser mozila firefox atau internet explorer

b. Ketik *http://192.268.02/BPPT* untuk menggunakan internal BPPT

Setelah diperoleh *bandwidth* yang memadai akses web publik BPPT dapat diakses melalui BPPT.or.id atau BPPT.com, tampilan layar akan menjadi sebagai berikut :

Gambar 3.3
Tampilan Menu dalam Sistem Boss



Sumber : BPPT tahun 2010

Gambar 3.3 mrupakan tampilan halaman utama sistem informasi Boss yang diakses melalui alamat web *http* *www.bppt.or.id*. Untuk meng-akses sistem informasi perizinan yang lebih detail dapat langsung ke tool informasi perizinan yang ada pada kolom menu. Dimana terdapat tampilan beberapa perizinan yang ada di Kota Bandung

Gambar 3.4
Tampilan Hal. Informasi Perizinan dalam Sistem Boss



Sumber : BPPT Tahun 2010

Gambar 3.4 merupakan tampilan halaman tentang informasi perizinan yang ada pada sistem Boss di BPPT Kota Bandung. Pada halaman ini, masyarakat yang

hendak akan membuat perizinan bisa melihat dulu informasi apa saja yang ada pada sistem Boss tersebut.

Gambar 3.5
Tampilan Hal. Pengajuan Izin Online melalui Sistem Boss



Sumber : BPPT Tahun 2010

Gambar 3.5 merupakan tampilan halaman pengajuan perizinan dengan menggunakan sistem Boss. Dengan mengarahkan kursor pada fitur pengajuan izin online, sistem akan menampilkan formulir pengajuan izin yang dapat diisi secara online. Setelah selesai klik kolom selesai, sistem akan memberikan nomor registrasi.